

Representasi Warga Tionghoa dan Kecinaan dalam Media Kontemporer Indonesia

Ezmieralda Melissa

Abstrak/Abstract

Seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi di era globalisasi ini, proses hibriditas budayapun berlangsung dengan cepat. Di satu sisi, kondisi ini mendorong orang-orang untuk mengenal dan belajar tentang berbagai budaya yang ada dalam masyarakat modern kita. Di sisi lain, kondisi ini juga mengangkat sejumlah permasalahan penting, seperti munculnya kesalahpahaman dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, banyak kelompok yang dulunya tertindas, termasuk etnis Tionghoa, muncul dan membuat diri mereka didengar pada era demokrasi baru bangsa ini. Seiring peraturan pemerintah baru yang memperbolehkan kelompok ini untuk mempraktikkan budaya mereka tanpa batasan-batasan tertentu, kondisi masyarakat Tionghoa di Indonesia telah berubah menjadi lebih baik dan budaya Tionghoapun mulai dirangkul oleh media populer. Didasari oleh fenomena tersebut, penelitian ini hendak menyelidiki bagaimana media kontemporer Indonesia merepresentasikan etnis Tionghoa dan budaya mereka serta bagaimana representasi ini merefleksikan 'posisi' kelompok minoritas ini dalam masyarakat Indonesia.

The rapid developments of communication and transportation technologies in this globalization era have accelerated the process of cultural hybridity. On the one hand, this condition encourages people to know and learn more about other cultures existing in our modern societies. On the other hand, it also creates some critical issues, such as misunderstanding and discrimination against the minority groups. Following the fall of the Soeharto's regime in 1998, many suppressed groups, including Chinese Indonesians, have emerged to let themselves being heard in the nation new democratic era. With new government regulations that allow the practice of their cultures without prior limitations, the condition for Chinese Indonesians has greatly improved and the Chinese culture is starting to be embraced by the popular media. Based on that, this paper aims to investigate how Indonesian contemporary media represent Chinese Indonesians and their cultures and how this representation reflects this minority group 'place' in the Indonesian community.

Kata Kunci/Keywords

Tionghoa, media Indonesia, representasi, hibriditas, dan kebangsaan.

Chinese-Indonesians, Indonesian media, representation, hybridity, nationhood

Swiss German University
EduTown BSD City
Tangerang 15339

ezmieralda.melissa@sgu.ac.id

Ambivalensi Menjadi Warga Tionghoa di Indonesia

"Tionghoa bukanlah – dan tidak akan pernah menjadi – substansi kuantitatif atau esensi abadi yang bisa dikatakan hadir maupun tak hadir" (Heryanto, 1998, h.110).

Interaksi antar budaya yang berbeda telah terjadi sejak awal peradaban manusia (Bhabha 1994a, 1995b; Tomlinson, 1999; dan Wu, 1997). Meski begitu, perubahan dalam era global, khususnya dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi,

telah meningkatkan dan mempercepat interaksi antar budaya. Karenanya, dalam banyak masyarakat – seperti di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya – kita dapat melihat akselerasi dalam proses multikulturalisme. Oleh sebab itu, wacana multikulturalisme dan globalisasi telah menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam agenda publik (Cottle, 2000, h. 1).

Perkembangan masyarakat diaspora yang terbentuk dari interaksi manusia seperti yang digambarkan di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Sinclair dan Cunningham, telah menciptakan sebuah proses negosiasi atau pelestarian budaya yang rumit, atau resistensi dan adaptasi budaya, yang dikenal dengan istilah ‘hibriditas budaya’ (2001, h.4). Gagasan ini telah mengundang berbagai penjelasan dari peneliti yang berbeda. Yang optimis, seperti Wu (1997), Tomlinson (1999), Sinclair dan Cunningham (2001), mendefinisikan konsep hibriditas budaya sebagai perpaduan budaya yang berbeda yang disebabkan oleh meningkatnya interaksi antar anggota masyarakat budaya tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya, orang-orang tak mudah itu beradaptasi dengan budaya lain. Argumen ini didukung oleh beberapa peneliti lain yang berusaha memberikan penjelasan yang lebih kritis dari gagasan tentang budaya. Dua karya paling menonjol yang membahas isu ini adalah milik Stuart Hall dan Homi K. Bhabha. Menurut Hall, identitas budaya seseorang merupakan “sebuah konstruksi, sebuah proses yang tak akan pernah selesai” (1995, h. 4). Hall juga menyatakan bahwa identitas budaya tak pernah ada dengan sendirinya, alih-alih, ia direproduksi dan diperjuangkan secara terus menerus, dengan tujuan untuk membedakan seseorang dari anggota lain dalam suatu kelompok budaya tertentu (*ibid.*). Penjelasan tersebut juga dikemukakan oleh Bhabha yang melihat hibriditas budaya sebagai sesuatu yang terus berubah (*ibid.*), yang dikonstruksikan ‘di bawah otoritas budaya dalam situasi antagonisme politis atau ketidaksetaraan’ (1995, h. 58). Karena, bisa dilihat bahwa ide tentang identitas budaya seringkali digunakan untuk membedakan kelompok minoritas dari masyarakat yang lebih luas.

Media memainkan peranan penting dalam memfasilitasi wacana multikulturalisme yang berbeda. Untuk memenuhi perannya dalam mendorong demokrasi, media kini sering mengklaim bahwa mereka menyediakan ruang bagi suara yang berbeda untuk didengar (Cottle, 2000, h. 2). Klaim ini diperkuat dengan argumen bahwa media tak hanya menyediakan ruang di mana orang bisa mendiskusikan dan mempresentasikan pendapat mereka tentang beragam isu publik, tapi juga bahwa mereka mempengaruhi warga dalam membentuk identitas mereka dalam hubungannya dengan orang lain (*ibid.*). Meski media menganggap bahwa mereka telah berusaha membuat program yang representatif bagi kelompok etnis yang berbeda yang ada dalam masyarakat multikultural, namun proses produksi mereka masih belum terlepas dari diskriminasi, yang berusaha mengikutsertakan satu kelompok sembari mengucualikan yang lain (Cottle, 2002, h. 16). Keprihatinan ini, yang dikemukakan banyak peneliti media, merupakan alasan di balik penulisan artikel ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam judul, objek penelitian ini

adalah representasi Kelompok Minoritas Tionghoa¹ dalam media kontemporer dan hubungannya dengan isu bangsa dan kebangsaan di antara anggota masyarakat tersebut.

Sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari lebih dari dua ratus kelompok etnis yang menghuni lebih dari 13,000 pulau, Indonesia seringkali menekankan keberagamannya sebagai salah satu kekuatan bangsa (Cribb, 1999, h. 3). Semangat optimisme ini selalu dikemukakan dan bahkan dipelihara dalam semboyan negara Bhineka Tunggal Ika, yang berarti bersatu dalam perbedaan. Sayangnya, semangat ini tak selalu tercermin dalam kehidupan warga Indonesia kebanyakan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh beberapa peneliti seperti Heryanto (1998), Lie (1999), dan Ang (2001), banyak orang Indonesia yang masih berprasangka dan memendam kebencian terhadap etnis minoritas, seperti Tionghoa. Hasilnya, perbedaan ras dan etnis merupakan penyebab utama banyak konflik yang terjadi di negara ini, di mana warga Tionghoa yang sering diberi label non pribumi, sering menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Salah satu bentuk nyata kebencian ini nampak pada kekerasan yang dialami etnis Tionghoa pada huru-hara tahun 1998.

Antipati yang tak berkesudahan terhadap warga Tionghoa sebagaimana digambarkan di atas adalah sebuah paradoks, karena jika kita menelusuri sejarah bangsa Indonesia dengan teliti, jelas terlihat bahwa warga Tionghoa telah memainkan peranan penting dalam masyarakat Indonesia sejak awal terbentuknya bangsa ini. Banyak warga Tionghoa yang tinggal di Indonesia dapat menelusuri asal usul mereka dari negeri Cina bagian selatan, seperti Fujian, Hainan dan Guangdong. Leluhur mereka datang ke nusantara pada tiga periode berbeda (Cribb, 1999, h. 4). Kedatangan gelombang pertama didorong oleh aktivitas perdagangan yang ditandai dengan perjalanan Zheng He pada abad ke-15; gelombang kedua datang sekitar masa Perang Opium pada abad ke-17; gelombang ketiga dan terakhir datang pada paruh pertama abad ke-20 (Cribb, 1999, h. 4). Banyak pendatang ini kemudian segera beradaptasi, misalnya dengan menikah dengan penduduk lokal, masuk agama Islam, mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia, dan seterusnya. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia secara luas (Heryanto, 1998, h. 103).

Heryanto mengungkapkan bahwa sentimen terhadap warga Tionghoa menjadi lebih terasa selama masa pemerintahan Soeharto.² Bisa dibayangkan Soeharto dengan sungguh-sungguh mencoba memisahkan warga Tionghoa dari masyarakat Indonesia lainnya saat pemerintahannya menyatakan bahwa warga Tionghoa merupakan satu dari empat ‘hal asing’ di samping ‘Barat’, ‘komunis’, dan ‘Islam fundamentalis’ (Heryanto, 1998, h. 97). Wacana yang biasa digunakan untuk menempatkan warga Tionghoa terpisah dari orang Indonesia lainnya adalah dengan

¹ Sepanjang artikel ini, kelompok ini akan disebut sebagai ‘warga Tionghoa’

² Pemerintahan Soeharto juga dikenal dengan nama rezim Orde Baru, yang memerintah dari tahun 1966 hingga 1998 (Heryanto, 1998, h. 97).

menggunakan isu perbedaan agama dan tradisi budaya mereka (Heryanto, 1998, h. 98). Di waktu yang sama, dalam propaganda politisnya, Soeharto selalu mengemukakan ide bahwa warga Tionghoa 'dianggap sangat dekat atau pada dasarnya rentan terhadap pengaruh komunisme' (*ibid.*).

Karena alasan ini, kelompok Tionghoa dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap 'proyek besar nasionalis dalam mencari akar dan asal usul otentik pribumi' (Heryanto, 1998, h. 97). Peneliti lainnya, Ien Ang, mengemukakan komentar yang lebih kuat. Ia berargumen bahwa semua rezim di Indonesia secara aktif meneguhkan 'pengasingan' (*othering*) secara sengaja terhadap etnis Tionghoa melalui keputusan politik mereka (2001, h. 39). Contoh yang paling jelas terlihat adalah kebijakan yang diberi nama Program Asimilasi³ yang diperkenalkan semasa Orde Baru (*ibid.*). Program ini diperkenalkan melalui Dekrit Presiden nomor 14 tahun 1967 (Budianta, 2000, h. 1), di mana Soeharto mengimplementasikan kartu identitas khusus untuk warga keturunan Cina, mengatur larangan praktik kebudayaan dan sekolah Cina, dan seterusnya (Ang, 2001, h. 39). Praktik-praktik demikian, menurut Ang, dilakukan untuk memastikan agar warga Tionghoa 'tetap terperangkap dalam ambivalensi atas ketidaktergolongannya ([non] *belonging*)' ke dalam masyarakat Indonesia (*Ibid.*).

Meski terdapat kepercayaan umum di antara para peneliti bahwa diskriminasi terhadap warga Tionghoa didorong semata oleh pemerintah Indonesia, beberapa peneliti lainnya berargumen bahwa diskriminasi ini juga dipicu oleh perlakuan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Hefner, di era kolonialisasi, warga Tionghoa memiliki hak-hak istimewa dibanding kelompok imigran lainnya di Indonesia (2001, h. 17). Hal ini terjadi dikarenakan posisi mereka sebagai warga Indonesia non-Melayu yang terbanyak di Nusantara (*ibid.*). Hak-hak istimewa ini juga diperkuat oleh kekuatan ekonomi mereka. Warga Tionghoa merupakan rekan penting dalam kebangkitan perdagangan yang mendasari 'era perdagangan' di Nusantara pada abad kelima belas hingga abad ke-17 (Reid dalam Hefner, 2001, h. 17). Warga Tionghoa masih termasuk kalangan kelas ekonomi atas, yang tak sebanding dengan jumlah mereka yang sedikit, kira-kira sepuluh juta dibandingkan 241.973.879 warga Indonesia atau empat persen dari total populasi (Suhandinata, 2009, h. 16). Sebagai hasil dari apa yang dipandang sebagai dominasi ekonomi, warga Tionghoa Indonesia selalu dipandang dengan curiga oleh warga pribumi.

Pada masa kini, beberapa peneliti berargumen bahwa Indonesia sedang menikmati atmosfer yang lebih demokratis menyusul kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 (Allen, 2003, h. 384-385). Pada tahun 2000, presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, mencabut Dekrit Presiden nomor 14 tahun 1967 dan mendorong warga minoritas untuk mempraktikkan budaya dan kepercayaan mereka, yang sebelumnya telah dilarang selama lebih dari tiga dekade (Budianta, 2000, h. 1). Hasilnya, banyak

kelompok tertindas, termasuk warga Tionghoa Indonesia, mulai muncul ke permukaan dan membiarkan suara mereka didengar dalam era demokrasi baru bangsa Indonesia (Allen, 2003, h. 384-385). Dengan perubahan ini, kondisi warga Tionghoa semakin membaik. Tanpa adanya pembatasan seperti dekade sebelumnya dan dengan adanya upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antar suku, budaya Tionghoa mulai disambut oleh media populer, seperti contohnya peliputan perayaan Tahun Baru Imlek secara besar-besaran, film-film pendek yang menggambarkan kehidupan warga Tionghoa di Indonesia, program berita televisi berbahasa Mandarin, dan bahkan ada media yang secara khusus ditargetkan untuk kelompok ini.

Pada waktu yang bersamaan, bisa dikatakan bahwa meski terjadi perkembangan, warga Tionghoa belum diterima sepenuhnya oleh mayoritas warga Indonesia sebagai bagian dari kelompok mereka. Misalnya saja, kebijakan warga negara⁴ yang memberi warga Tionghoa hak yang sama dengan warga Indonesia pribumi telah mengundang berbagai kritik dari masyarakat Indonesia, setidaknya sebagaimana direpresentasikan dalam media populer (Situs Metro TV, 2006). Sebagian besar mereka yang mengkritik mengklaim bahwa kebijakan baru ini akan lebih jauh menguntungkan warga Tionghoa secara ekonomi dan merugikan masyarakat berpenghasilan kecil (Situs Metro TV, 2006). Wacana demikian yang muncul di media masih menggambarkan praktik 'pengasingan' terhadap warga Tionghoa, khususnya dengan menyampaikan superioritas ekonomi mereka dan karakter negatif mereka seperti arogansi dan eksklusivitas, yang menghambat mereka untuk diperlakukan sama sebagaimana warga negara yang lain (Situs Metro TV, 2006).

Berdasarkan berbagai diskusi yang telah dibahas di atas, artikel ini berupaya untuk mempelajari teks media tentang warga Tionghoa dari dua majalah yang terbit di Indonesia, yaitu *Tempo* dan *Jia Xiang*, dari bulan Januari hingga September 2012. Perbandingan yang dibangun bertujuan untuk melihat bagaimana kedua media tersebut merepresentasikan warga Tionghoa dan budaya mereka serta bagaimana representasi ini merefleksikan 'posisi' kelompok minoritas ini dalam masyarakat Indonesia dan mempengaruhi rasa identitas nasional warga Tionghoa.

Merepresentasikan Minoritas

Media seringkali dikritik karena bersikap bias, tak representatif, kurang profesional, dan mengalah pada penindasan kapitalisme. Sudah lama dipahami bahwa faktor ekonomi bisa dengan kuat mempengaruhi praktik jurnalisme (Schudson, 2003, h. 89). Hal ini berarti bahwa agenda berita secara signifikan bergantung pada seberapa besar berita tersebut dapat dijual kepada publik. Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia di mana media merupakan usaha kapitalis dan bekerja sebagai bagian dari sistem

³ Program ini ditujukan bagi warga Tionghoa yang tinggal di Indonesia dengan tujuan untuk mengintegrasikan mereka secara penuh ke dalam masyarakat Indonesia.

⁴ Tahun 2006, pemerintah Indonesia memperkenalkan UU Warga Negara nomor 12/2006 yang memberikan hak bagi warga Indonesia non-pribumi untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa proses naturalisasi yang panjang (Situs Departemen Hukum dan HAM).

ekonomi pasar (Hidayat, 1997, h. 179). Lebih jauh lagi, perlu dicatat bahwa produk jurnalisme merupakan sebuah hasil dari proses seleksi dan diseminasi yang panjang, sebuah proses yang diinternalisasi oleh para praktisi, dan melibatkan serangkaian nilai dan ideologi yang kompleks yang membentuk dunia mereka, yang dikenal dengan nama habitus jurnalis (*journalists' habitus*; Schudson, 2003, h. 89). Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa alih-alih mempresentasikan realita pada khalayak, jurnalis cenderung membuat wacana dominan yang dipandang lebih menguntungkan bagi institusi mereka (Schudson, 2003, h. 92). Terlebih lagi, Hall berargumen dari sudut pandang *Althusserian-Marxist* bahwa produksi berita juga sangat ditentukan oleh 'hubungan antara "pendefinisi primer", yaitu para pimpinan institusi dan "pendefinisi sekunder", yaitu media' (Hall dalam Bacon & Nash, 2004, h. 21). Menurut Hall, ketergantungan media pada *status quo* sebagai sumber berita memungkinkan pihak-pihak dominan untuk 'mendikte interpretasi utama atas suatu topik atau peristiwa' dan lebih jauh lagi menghasilkan 'reproduksi kekuasaan' bagi mereka (Hall dalam Bacon & Nash, 2004, h. 21).

Kritik-kritik ini merupakan yang paling vokal dalam hal representasi kelompok minoritas. Meski media mengklaim bahwa menyediakan keragaman muatan merupakan salah satu tujuan utama mereka, mereka masih dikritik karena tidak meliputi kelompok minoritas dalam jumlah yang cukup atau meliputi mereka tapi dengan cara yang cenderung stereotipikal (Cottle, 2000, h. 3). Cottle juga menyatakan bahwa di dalam produksi media, masih ada proses memasukkan beberapa pihak dan mengecualikan yang lain, yang ia sebut sebagai masalah 'relasi ras' (*ibid.*). Ia juga mengemukakan bahwa karena peran penting media dalam membentuk pemahaman kita akan identitas diri dan masalah ini telah menjadi sangat menonjol dalam studi media sekarang ini (*ibid.*). Beberapa peneliti media, seperti Cottle (2000) dan Van Dijk (2000) menyatakan bahwa tindakan diskriminatif untuk membedakan kelompok minoritas ini menciptakan sebuah bentuk 'rasisme baru', di mana ide akan supremasi budaya seseorang atas orang lainnya secara cerdas dilekatkan dalam wacana keseharian dengan tujuan memarginalkan kelompok minoritas (van Dijk, 2000, h. 34). Sayangnya, amat sulit untuk memutus rantai pelaporan media yang rasis karena beberapa hal. Yang pertama, anggota kelompok minoritas tak punya akses ke media. Tak hanya itu, mereka juga hanya terwakili dengan praktisi yang sedikit jumlahnya dalam industri media, tapi mereka juga merupakan sebagian kecil di antara otoritas, yang seringkali menjadi pendefinisi primer dalam proses pembuatan berita (van Dijk, 2000, h. 37).

Akhirnya, isu lain yang sering diasosiasikan dengan representasi kelompok minoritas adalah apa yang Shohat sebut sebagai 'beban representasi' (1995, h. 169). Menurut Shohat, istilah ini bisa didefinisikan sebagai sebuah diskursus yang menyoroti ketidakmampuan ras atau kelompok etnis tertentu untuk merepresentasikan kelompoknya (*ibid.*). Saat beradaptasi pada diskursus ini, media bisa saja, misalnya, memilih sebuah gambaran seseorang dari latar belakang ras yang berbeda untuk bercerita tentang

warga Tionghoa. Contoh praktik ini adalah David Carradine, yang menjadi terkenal setelah berperan sebagai ksatria rahib dalam serial TV terkenal tahun 1970an, Kung Fu.

Sebagaimana dikemukakan Cottle, tidak ada cara yang benar dalam merepresentasikan kelompok minoritas tanpa entah bagaimana terjebak dalam misinterpretasi atau stereotip (2000, h. 20). Cottle juga menunjukkan keprihatinan bahwa untuk mempresentasikan kelompok minoritas dalam media tak akan membentuk pemahaman yang lebih baik akan budaya mereka, tapi malah akan meneguhkan 'keterasingan' mereka dari budaya *mainstream* (*ibid.*). Peneliti lainnya, Herman Gray, juga percaya bahwa sangat sulit untuk mempresentasikan sebuah kelompok budaya dalam cara yang 'tidak bias' kecuali kita memahami konteks sejarah, sosial, dan latar belakang budaya kelompok tersebut (1995, h. 45). Inilah yang terjadi dalam praktik media populer saat ini, di mana media didominasi oleh kelompok mayoritas yang tak punya wawasan tentang kelompok minoritas (*ibid.*). Pada saat yang sama, Gray juga mempertanyakan kemunculan produser atau praktisi media dari kalangan minoritas yang mengklaim dirinya menyediakan alternatif dari media *mainstream* (1995, h. 46). Keprihatinannya adalah bahwa meskipun produser/praktisi ini berupaya untuk memberi suara pada kelompok minoritas, mereka masih tidak dapat menunjukkan kompleksitas yang melekat di dalamnya (*ibid.*). Dan hal ini, sekali lagi, sering menjadi misinterpretasi kelompok minoritas oleh anggota kelompok mereka sendiri (*ibid.*). Karenanya, artikel ini akan mencoba melihat bagaimana media, yang dijalankan oleh dan menyoar pada warga Tionghoa, akan merepresentasikan kelompok ini dengan lebih baik dibandingkan media *mainstream* seperti *Tempo*.

Bagaimana Media Kontemporer Indonesia Merepresentasikan Warga Tionghoa?

Untuk mempelajari bagaimana media kontemporer Indonesia mendiskusikan warga Tionghoa dan kecincaannya, dua majalah dipilih sebagai objek studi ini. Kedua majalah ini adalah *Tempo* dan *Jia Xiang*. *Tempo* merupakan majalah *mainstream* dengan jumlah pembaca tertinggi yaitu sebanyak 300,000 (Prayudi, 2010, h. 41). Diterbitkan oleh PT. Tempo Inti Media, Tbk, majalah *Tempo* dikenal selalu lugas dan kritis dalam melaporkan berbagai peristiwa (Steele, 2005, h. 89). Di sisi lain, *Jia Xiang*, yang secara harfiah berarti 'kampung halaman', merupakan majalah baru yang berusaha menggaet pasar dari komunitas Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam semboyannya, 'Bersinergi dalam Keberagaman', majalah ini – yang dituliskan sepenuhnya dalam Bahasa Indonesia – bertujuan untuk mendorong integrasi antara warga Indonesia dengan warga Tionghoa. Majalahnya sendiri diterbitkan dan dipimpin oleh seorang warga Tionghoa yang ambisius dari Sumatera Utara bernama Iman Sjahputra (Situs *Jia Xiang*, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan memilih artikel-artikel dari versi elektronik kedua majalah tersebut dalam periode Januari hingga Oktober 2012. Artikel-artikel yang dikumpulkan sebagai contoh adalah yang menulis tentang warga Tionghoa, bukan tentang negara Cina atau kelompok

diaspora Cina lainnya. Hasilnya, hanya lima artikel dari masing-masing majalah yang dikaji dan dilaporkan dalam artikel ini. Selanjutnya, analisis diperoleh dari pengujian poin-poin artikel berikut:

Tipe Artikel

Secara mengejutkan, baik *Tempo* dan *Jia Xiang* tidak menjadikan artikel tentang warga Tionghoa sebagai berita utama mereka. Alih-alih kebanyakan artikel berbentuk opini atau tulisan *feature*. Kedua majalah bahkan tidak meliput Perayaan Tahun Baru Imlek dengan mendetail. Ada banyak alasan yang mungkin di balik temuan ini. Yang pertama, hal ini bisa jadi disebabkan oleh berita lain yang lebih penting yang terjadi bersamaan dengan perayaan tersebut. Lagipula, penerbit bisa jadi merasa bahwa berita mengenai warga Tionghoa lebih baik dipresentasikan dalam bentuk berita yang lebih ringan atau *soft news* untuk memancing ketertarikan pembaca akan kehidupan komunitas ini. Dalam kasus *Jia Xiang*, bisa jadi ada kemungkinan penerbit ini secara sengaja menghindari penulisan artikel yang amat 'tipikal warga Tionghoa', karena hal tersebut bisa saja membatasi pembacanya dan melabeli penerbitan ini sebagai penerbitan yang eksklusif. Walaupun demikian, penemuan ini juga menunjukkan bahwa cerita tentang warga Tionghoa juga masih dianggap cerita kelompok minoritas dan kurang bernilai berita bagi masyarakat luas. Maka dari itu, berita-berita ini dipresentasikan sebagai pelengkap berita lain yang lebih serius. Semua contoh tersebut merupakan bukti dari apa yang dikemukakan oleh Schudson (2003) tentang pengaruh habitus jurnalis dalam teks media. Ketika media bekerja sebagai sebuah bisnis, mereka harus memenuhi tujuan utama mereka, yaitu jumlah pembaca yang banyak. Alhasil, mereka cenderung membuat keputusan strategis – sebagaimana disebutkan di atas – untuk memenuhi tujuan ini.

Narasumber

Meski faktanya hampir semua artikel mencoba merujuk pada warga Tionghoa sebagai narasumber mereka, seringkali sumber-sumber ini bukanlah bagian sentral dari artikel. Seringkali artikel-artikel ini cenderung menjadi laporan informatif yang menggunakan interpretasi jurnalis dari peristiwa tersebut dan bukannya opini atau komentar narasumber. Ada beberapa kemungkinan yang bisa jadi menyebabkan sedikitnya narasumber Tionghoa. Yang pertama, hal ini bisa saja disebabkan oleh keterbatasan akses para jurnalis pada anggota komunitas Tionghoa. Kemungkinan lainnya bisa saja para jurnalis beranggapan bahwa peristiwa atau cerita tersebut bisa dilaporkan dengan cukup lengkap tanpa perlunya mendapat kutipan dari warga Tionghoa. Fakta menarik lain yang perlu ditunjukkan adalah tatkala seseorang yang berasal dari komunitas Tionghoa dipresentasikan sebagai sumber informasi, sumber tersebut biasanya merupakan orang yang merupakan figur publik atau pembentuk opini masyarakat (misalnya saja akademisi, aktor, pengusaha, dan lain-lain). Kemungkinan orang-orang ini dipilih karena mereka memiliki akses yang lebih besar pada media atau mereka adalah orang yang dianggap oleh para jurnalis sebagai pen-

definisi utama dari sebuah berita (Bacon & Nash, 2004, h. 21). Dengan alasan tersebut, bisa dikatakan bahwa media Indonesia masih belum memberikan kesempatan yang luas bagi minoritas Tionghoa untuk mewakili diri mereka, sebuah isu yang digambarkan Shohat sebagai 'beban representasi' atau kecenderungan media untuk memilih sumber-sumber lain ketika membuat berita tentang kelompok minoritas (1995, h. 169).

Kemungkinan lainnya merefleksikan argumen Gray bahwa karena sedikitnya jumlah praktisi media yang berasal dari kelompok minoritas – dalam hal ini praktisi media Tionghoa – sulit bagi warga Tionghoa untuk mendapatkan akses pada media, yang hasilnya adalah hanya sedikit berita yang ditulis tentang mereka (1995, h. 45). Namun, harusnya argumen di atas tak berlaku bagi majalah *Jia Xiang*. Karena *Jia Xiang* memang utamanya ditujukan bagi komunitas warga Tionghoa dan dipublikasikan oleh warga Tionghoa, bisa diasumsikan bahwa kebanyakan jurnalis yang bekerja pada *Jia Xiang* merupakan warga Tionghoa. Maka dari itu, harusnya mereka memiliki akses yang besar pada komunitas ini atau setidaknya familiar dengannya. Sayangnya, latar belakang etnis dari jurnalis *Jia Xiang* tidak dapat ditemukan melalui situs mereka; oleh sebab itu asumsi di atas tak dapat dikonfirmasi.

Deskripsi

Poin berikutnya yang layak didiskusikan berhubungan dengan cara warga Tionghoa dideskripsikan dalam artikel. Yang pertama, nampak terlihat bahwa para jurnalis saat ini lebih berhati-hati untuk tidak merepresentasikan warga Tionghoa dalam cara stereotipikal. Klaim ini terbukti oleh fakta bahwa ada beberapa artikel yang menghindari penggambaran warga Tionghoa sebagai orang kaya. Contohnya bisa dilihat dalam artikel berjudul 'Si Cina dari Sudut Borneo' dalam *Tempo*, 30 April 2012, yang bercerita tentang Daud Jordan, seorang petinju yang datang dari keluarga Tionghoa miskin di Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam paragraf ketiga, ditulis 'Daud lahir dari pasangan petani karet Hermanus Tjun Lay dan Nathalia...' Meski kalimat tersebut tidak secara langsung menyebutkan bahwa keluarga Daud miskin, tapi kebanyakan pembaca akan memahami bahwa petani karet tak berpenghasilan besar.

Hal ini diperkuat dengan kalimat berikutnya, yang menyatakan 'Hingga kini rumah mereka, yang berjarak sepuluh jam perjalanan darat dari ibu kota Kabupaten Ketapang, belum teraliri listrik'. Contoh lain yang menonjol dari upaya memecah stereotip warga Tionghoa bisa ditemukan dalam sebuah resensi buku yang terbit di *Tempo*, 12 Agustus 2012. Paragraf pembuka artikel tersebut berbunyi 'Tak semua peranakan Tionghoa semakmur Liem Sioe Liong. Di masa tuanya, Encek (paman) Ek Ceng masih mencangkul kebun yang ia tanami singkong, papaya, kacang, dan buah-buahan untuk menghidupi keluarganya.' Di sini dapat dilihat bahwa sang penulis secara sengaja menghadirkan Liem Sioe Liong, seorang Tionghoa yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia sebagai antitesis dari Encek Ek Ceng. Namun, poin yang menarik dari contoh ini adalah bahwa kalimat tersebut secara tidak langsung meng-

konfirmasi antipati yang dirasakan oleh pribumi Indonesia terhadap warga Tionghoa di mana sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa warga Tionghoa kaya raya, punya hak-hak istimewa, dan tidak membaur dengan masyarakat Indonesia lainnya. Ini yang disebut Van Dijk (2000) sebagai rasisme bentuk baru, di mana wacana rasisme tak dinyatakan secara lugas, tapi malah dimasukkan ke dalam teks media dengan cara yang halus.

Meskipun demikian, ada juga beberapa artikel yang menekankan perbedaan antara warga Tionghoa dengan pribumi. Misalnya saja, dalam laporan budaya yang ditulis dalam *Jia Xiang* pada 27 Oktober 2012, deskripsi ritual berdoa warga Tionghoa dideskripsikan panjang. Artikel ini menggambarkan beberapa aktivitas yang dilakukan warga Tionghoa sebagai ritual religius, misalnya saja pergi ke kuil, menyanyikan doa puji-pujian, dan membakar dupa. Kata-kata tersebut dapat dipandang sebagai perbedaan antara warga Tionghoa dengan orang pribumi, yang sebagian besar Muslim, yang tidak pergi ke kuil dan tidak menjalani ritual agama yang sama. Contoh lain dari perbedaan ini bisa ditemukan dalam sebuah artikel *Tempo* pada 3 September 2012. Dalam sebuah wawancara dengan Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab dipanggil Ahok (saat itu merupakan kandidat Wakil Gubernur Jakarta), artikel tersebut tak hanya mengemukakan perbedaan Ahok dengan warga Indonesia lainnya, tapi juga melaporkan kebencian yang tumbuh di antara warga Indonesia yang tak ingin ia menjadi pemimpin, bunyinya 'Kehadiran pria keturunan Tionghoa beragama Kristen yang mendadak di pentas politik Ibu Kota itu memicu gerilya penebaran isu SARA dari mereka yang tidak siap.' Wacana ini cukup mengkhawatirkan karena, sebagaimana diungkapkan oleh David Wu, kebanyakan orang masih kurang pemahamannya akan toleransi dan perbedaan budaya (1997, h. 142). Maka dari itu, representasi yang demikian bisa menyebabkan alienasi yang lebih jauh lagi atas kelompok Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya, karena sulit untuk menghadirkan kompleksitas yang melekat dalam komunitas Tionghoa (Gray, 1995, h. 46).

Gaya dan Nuansa

Gaya dan nuansa penulisan pada teks dalam media juga layak dianalisis untuk tujuan studi ini. Yang pertama berkaitan dengan cara warga Tionghoa dipanggil dalam teks. Hampir dalam banyak artikel, ketika warga Tionghoa disebut dalam teks, kata ganti yang digunakan untuk merujuk adalah 'mereka'. Deiksis⁵ ini, menurut Billig, seringkali digunakan untuk membuat batasan antara mereka yang diterima sebagai warganegara dan mereka yang dianggap sebagai *alien* (1995, h. 94). Sebaliknya, kebanyakan artikel merujuk dengan menggunakan kata 'warga Tionghoa', istilah yang lebih bisa diterima untuk menyebut kelompok etnis ini ketimbang istilah bernada menghina yang biasa digunakan, yaitu 'orang Cina'. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit perbaikan

dalam praktik jurnalisme untuk menciptakan pandangan yang lebih positif terhadap komunitas ini.

Lebih jauh lagi, ditemukan bahwa kebanyakan artikel bernuansa positif dan memasukkan pandangan optimis dari warga Tionghoa bahwa masa depan mereka di Indonesia akan semakin cerah karena hubungan antar kelompok etnis telah meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan perasaan positif yang ada di kalangan warga Tionghoa bahwa kini mereka diterima dengan cara yang lebih baik oleh warga Indonesia lainnya. Namun, khususnya di *Jia Xiang*, masih ada beberapa komentar yang dikatakan oleh anggota komunitas Tionghoa tentang penyesalan atas apa yang terjadi pada kelompoknya di masa lalu. Mereka merasa bahwa dirinya telah diperlakukan secara tidak adil dan yang perlu dipersalahkan atas diskriminasi ini adalah pemerintah Indonesia. Sentimen semacam ini dapat ditemukan dalam artikel *Jia Xiang* pada 27 Oktober 2012 yang berbunyi 'Berbagai kasus berbau SARA yang belakangan marak terjadi tak lepas dari budaya diskriminasi yang puluhan tahun membelenggu masyarakat Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan orde baru.' Tambahan lagi, warga Tionghoa dalam teks juga mengekspresikan perasaan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia, meski masih ada fakta bahwa warga pribumi masih memandang mereka dengan prasangka. Contohnya dalam artikel *Jia Xiang* tanggal 27 Oktober 2012 berjudul 'Perbedaan Etnis Bukan Persoalan bagi Bangsa', seorang warga Tionghoa berkomentar 'Saya tidak pernah merasa ada hal yang aneh dengan keturunan saya yang Cina. Saya lahir dan besar di negeri ini. Saya tetap merasa sebagai warga negara Indonesia sama dengan yang lainnya.' Ilustrasi lain dari rasa nasionalisme ini dapat ditemukan dalam sebuah artikel tentang imigran ilegal dari Cina, yang dipublikasikan dalam *Tempo* 11 Juni 2012 yang berbunyi '...imigran ini bukan orang asing sama sekali. Mereka adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa yang terpaksa pergi dari negeri ini akibat Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959.' Artikel ini lalu berlanjut '...setelah lebih dari dua dekade merantau ke Cina, banyak dari mereka yang rindu pulang ke Indonesia.' Kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa meskipun leluhur mereka berasal dari Cina, namun keturunannya masih menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka.

Akhirnya, artikel-artikel tersebut juga melaporkan bahwa faktanya warga Tionghoa dan warga pribumi selalu hidup berdampingan dengan damai meski pemerintah berupaya untuk menciptakan ketegangan di antara mereka. Sebuah contoh dari argumen tersebut dapat ditemukan dalam artikel *Tempo* tanggal 12 Agustus 2012. Paragraf terakhir dari artikel tersebut menggambarkan persahabatan antara warga Tionghoa dengan pribumi di pinggiran Kali Brantas pada tahun 1960an, '...ketika kepentingan politik berusaha memporandakan kohesivitas itu..., upaya itu tak mampu menghancurkan persahabatan anak-anak Jawa dengan peranakan Tionghoa.'

Contoh-contoh yang dihadirkan dalam artikel ini mengkonfirmasi bahwa hibriditas budaya antara pribumi dengan warga Tionghoa telah berkembang selama bertahun-tahun dan warga Tionghoa telah terintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, adalah kepentingan politik tertentu

⁵ Hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa; kata yg mengacu kepada persona, waktu, dan tempat suatu turan.

yang mencoba memisahkan kelompok minoritas ini dengan anggota masyarakat lainnya. Hal ini mencerminkan argumen Bhabha bahwa hibriditas akan diproduksi secara berkelanjutan 'di bawah otoritas budaya dalam kondisi antagonisme atau ketidakadilan politik' (1995, h. 58).

Topik-topik yang hadir dalam artikel-artikel di atas akan dibahas sebagai poin terakhir dalam kajian ini. Dari sepuluh naskah yang digunakan sebagai sampel, topik-topik berikutlah yang paling sering ditemukan: diskriminasi, integrasi, penyanggahan stereotip, dan rasa nasionalisme. Namun, *Tempo* dan *Jia Xiang* memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadirkan topik-topik tersebut. Sementara *Tempo* lebih dominan dalam mengangkat topik-topik diskriminasi dan kebencian yang dialami oleh warga Tionghoa, dan secara kritis membahas siapa yang patut disalahkan atas diskriminasi tersebut; *Jia Xiang* tampak lebih tertarik melaporkan nasionalisme yang dirasakan warga Tionghoa terhadap Indonesia. Selain itu, kebanyakan artikel dalam *Jia Xiang* juga menghadirkan suara warga Tionghoa bahwa meski mereka mencintai negeri ini, mereka merasa tidak perlu beradaptasi secara penuh dengan budaya Indonesia. Alih-alih, artikel-artikel tersebut menunjukkan kehendak warga Tionghoa untuk tetap menjalankan kebiasaan budaya dan identitas Cina mereka, sembari berintegrasi dengan masyarakat Indonesia yang lebih luas. Tambahan lagi, kedua majalah juga membahas proses integrasi yang dialami warga Tionghoa untuk diterima sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, misalnya saja berpindah ke agama Islam, menikahi warga pribumi, mengubah nama menjadi nama Indonesia, berkontribusi untuk negara dengan menjadi prajurit semasa perang, dan seterusnya. Selain itu, kedua majalah juga membahas beberapa penyebab diskriminasi (kebanyakan peraturan pemerintah) dan upaya untuk menyediakan solusi bagi meningkatnya hubungan antar ras di masa depan. Penemuan ini menunjukkan situasi ambivalen yang dihadapi warga Tionghoa, bahkan di era reformasi. Meskipun demikian, media kontemporer nampaknya mencoba menghadirkan

situasi kompleks ini dengan cara yang lebih baik untuk memperbaiki pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kondisi problematik yang dihadapi oleh warga Tionghoa.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penemuan ini menyingkap fakta bahwa meski media saat ini sudah mencoba untuk membahas warga Tionghoa dan kecinaan mereka dengan cara yang lebih seimbang, mereka terkadang masih menghadapi kendala dalam usahanya. Sejumlah tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya praktisi media dari kalangan minoritas, keputusan redaksi untuk memberikan bobot yang berbeda untuk berita yang berbeda, dan kesulitan yang dialami dalam mempresentasikan fenomena yang demikian kompleks. Sayangnya, kesulitan-kesulitan tersebut tak hanya dihadapi oleh media yang *mainstream*, tapi juga oleh media yang secara khusus ditujukan bagi komunitas Tionghoa, seperti *Jia Xiang*. Penting diingat bahwa budaya terus berubah; karena itu, tak mungkin media bisa merepresentasikan sebuah budaya tanpa terjebak dalam sejenis stereotip atau misinterpretasi (Cottle, 2000, h. 20).

Meski warga Tionghoa masih mengalami ketidakberimbangan representasi dalam media kontemporer Indonesia, penemuan ini juga mengungkapkan bahwa warga Tionghoa merasa hubungan mereka dengan warga pribumi semakin baik, dan salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam perkembangan ini adalah media Indonesia yang menjadi lebih demokratis. Karenanya, dengan keterbatasan yang melekat dalam media, yang terpenting bukanlah representasi yang ideal, tapi sebuah ruang yang diberikan kepada kelompok minoritas di mana mereka dapat berupaya untuk menunjukkan suara mereka yang berbeda dalam lingkungan yang bebas dan demokratis (2000, h. 23). Seraya Indonesia memasuki era yang lebih demokratis, negara ini akan terus belajar bagaimana memperbaiki kondisi ini dan bisa jadi suatu saat nanti Indonesia dapat menemukan bentuk baru ruang publik versinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Ahja, H.J. (1999). Menjadi Tuan di Rumah Sendiri. Dalam Sa'dun, M. M. (Ed.), *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran* (h.81-84). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Althusser, L. (1977). *Lenin and Philosophy and Other Essays*. London: NLB.
- Ang, I. (2001.) Trapped in Ambivalence: Chinese Indonesians, Victimhood, and the Debris of History. Dalam M. Morris and B. de Bary (Eds.), *"Race" Panic and the Memory of Migration* (h.21-47). Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Bacon, W. & C. Nash (2004). Stories in Distress: Three Case Studies in Australia Media Coverage of Humanitarian Crises. *Australian Journalism Review* 26 (1): 19-39.
- Barthes, R. (2000). *A Barthes Reader*. London: Vintage.
- Benhabib, S. (2002). On the Use and Abuse of Culture. Dalam S. Benhabib, *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era* (h.1-23). Princeton: Princeton University Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Bhabha, H. K. (1995). Culture's In-Between. Dalam S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (h.53-60). London and Thousand Oaks, California: SAGE.
- Billig, M. (1995). *Banal Nationalism*. London. SAGE Publications.
- Budiman, A. (1998). Cina atau Tionghoa. Dalam Sa'dun, M. M. (Ed.), *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran* (h.115-119). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Cottle, S. (2000). *Ethnic Minorities and the Media*. Buckingham: Open University Press.
- Cottle, S. (2000). A Rock and a Hard Place: Making Ethnic Minority Television. Dalam S. Cottle (Ed), *Ethnic Minorities and the Media* (h.100-117). Buckingham and Philadelphia: Open University Press.
- Dewanto, N. (1997). Against Purity: Reflections of an Indonesian Writer. Dalam D. Y. H. Wu, H. McQueen, & Y. Yamamoto (Eds.), *Emerging Pluralism in Asia and the Pacific* (h.149-179). Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong.
- Edensor, T. (2002). *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford and New York: Berg.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London and New York: Routledge.
- Fowler, R. (1991). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. London: Routledge.
- Gray, H. (1995). The Politics of Representation in Network Television. Dalam D. Kellner & M. Durham (Eds.), *Media and Cultural Studies Keywords* (h.439-461). Blackwell.
- Hall, S. (1995). Introduction: Who Needs 'Identity'? Dalam S. Hall & P.

- du Gay (Eds.), *Questions of Cultural Identity* (h.1-17). London and Thousand Oaks, California: SAGE.
- Hall, S. (1996). Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debate. Dalam J. Curran, D. Morley & V. Walkerdine (Eds.), *Cultural Studies and Communication*, (h.11-35). London: Arnold.
- Hansen, A. et al. (1998). *Mass Communication Research Methods*. Basingtoke: McMillan
- Hefner, R. W. (2001). Introduction: Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia. Dalam R. W. Hefner (Ed.), *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (h.1-49). Honolulu: University of Hawaii Press.
- Heryanto, A. (1998). Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesians in Public Culture. Dalam J. S. Kahn (Ed.), *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand* (h.95-114). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Heryanto. (1998). Kapok Jadi Nonpri: Terorisme Negara dengan Isu Rasial. Dalam Sa'dun, M. M. (Ed.), *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran* (h.120-128). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Jia Xiang website <http://jia-xiang.biz> diakses pada September 2012.
- Lie, A. (1999). Soal "Dosa" WNI Tionghoa. Dalam Sa'dun, M. M. (Ed.), *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran* (h.133-137). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- O' Shoughnessy, M & J. Stadler (2005) *Media and Society: An Introduction*. 3rd ed, South Melbourne: Oxford University Press.
- Lister, M & L. Wells (2001) Seeing Beyond Belief: Cultural Studies as an Approach to Analysing the Visuals. Dalam T. van Leuween and C. Jewitt (eds.) *Handbook of Visual Analysis*. London, Thousand Oaks: SAGE.
- Media Net website <http://www.newsmedianet.com.au> diakses pada Mei 2006.
- Metro TV website <http://www.metrotvnews.com> diakses pada in May 2006.
- Pekerti, A. (1999). Orang Indonesia Keturunan Cina dan Persatuan Bangsa. Dalam Sa'dun, M. M. (Ed.), *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran* (h.71-80). Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Prayudi. (2010). Textual Analysis of *Tempo News Magazine* Representation of Terrorism. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (1). (2010): 41.
- Bacon, W. & Nash, C. (2004). Stories in Distress: Three Case Studies in Australia Media Coverage of Humanitarian Crises. *Australian Journalism Review* 26 (1): 19-39.
- Schudson, M. (2003). *The Sociology of News*. New York: W. W. Norton and Company
- Shohat, E. (1995). *Multiculturalism and the Media*. New York: Routledge.
- Sinclair, S & Cunningham, J. (2001). *Floating Lives: The Media and Asian Diasporas*. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.
- Steele, J.E. (2005). *Wars Within: the Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Stokes, J. (2003). *How to Do Media and Cultural Studies*. London: SAGE.
- Suhandinata, J. (2009). *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalisation and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Tempo* website <http://www.tempo.co> diakses pada September 2012.
- Van Dijk, T.A. (1994). Discourse and Cognition in Society. Dalam D. Mitchell & D. Crowley (Eds.), *Communication Theory Today* (h.107-126). Cambridge: Polity Press.
- Van Dijk, T.A. (1988). *News as Discourse*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Van Dijk, T.A. (2000). New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach. Dalam S. Cottle (Ed.), *Ethnic Minorities and the Media* (h.33-49). Buckingham: Open University Press.
- Wibowo, I. (2000). Kapan Ke-Cina-an Akan Berhenti?. *Mitra (Jurnal Budaya dan Filsafat)* 4: 30-34.
- Wu, D. Y. H. (1997). Facing the Challenge of Multiple Cultural Identities. Dalam D. Y. H. Wu, H. McQueen, & Y. Yamamoto (Eds.), *Emerging Pluralism in Asia and the Pacific* (h.141-147). Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong.